

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera, peran pemerintah sangatlah penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kebijakan ekonomi, pelayanan publik, hingga pemetaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berkaitan pada kondisi ekonomi, tetapi juga pada akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada kepentingan publik dan mampu meningkatkan kualitas seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga mencakup pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara secara adil dan efektif. Selain itu pemerintah harus memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses layanan publik yang berkualitas, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan masyarakat memiliki kesempatan untuk berkembang secara sosial maupun ekonomi masyarakat perkotaan terutama masyarakat perdesaan.

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa, sangatlah penting dan esensial. Pemerintah berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan kebijakan, program, dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Desa merupakan fondasi utama dari struktur masyarakat di Indonesia, dengan mayoritas penduduk yang tinggal di sana menggantungkan hidup mereka pada sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Oleh karena itu, kesejahteraan desa berhubungan langsung dengan kesejahteraan nasional.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses ke infrastruktur yang memadai di pedesaan. Tanpa campur tangan pemerintah, desa-desa di daerah terpencil berisiko tertinggal jauh dalam hal akses terhadap sumber daya dan layanan penting. Pemerintah berperan dalam memperluas akses pendidikan, mulai dari penyediaan

sekolah dasar hingga pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal, yang bertujuan meningkatkan potensi sumber daya manusia di desa. Demikian pula dalam hal kesehatan, pemerintah harus memastikan tersedianya layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas, yang dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Lebih jauh lagi, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan masyarakat desa berkembang. Ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberian akses permodalan, serta bantuan teknis untuk sektor-sektor unggulan di desa. Dengan adanya dukungan tersebut, masyarakat desa dapat mengembangkan potensi lokal, seperti hasil pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan, yang kemudian dapat didorong untuk masuk ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan, pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan mereka.

Peran penting pemerintah juga termaktub dalam konstitusi Indonesia, yang memberikan landasan hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, misalnya menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, serta bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak. Ini berarti bahwa pemerintah memiliki mandat konstitusional untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi negara, termasuk yang berada di desa-desa, dikelola demi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Berbagai kebijakan dan program yang diluncurkan oleh pemerintah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah salah satu bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan langsung dan alokasi dana yang bertujuan meningkatkan pembangunan desa.

Secara keseluruhan, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dan tidak tergantikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah tidak hanya menyediakan infrastruktur fisik, tetapi juga mengembangkan kebijakan dan program yang memungkinkan masyarakat desa

untuk memberdayakan diri mereka dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Dukungan hukum dalam bentuk UUD 1945 serta undang-undang turunan lainnya memperkuat legitimasi dan keberlanjutan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri, terutama di desa.

Perdesaan memegang peran penting dalam struktur sosial dan ekonomi suatu negara, terutama di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya tinggal di daerah pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Meskipun desa memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi, mereka masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Berikut tantangan utama yang ada di desa:

1. Keterbatasan Infrastruktur

Di banyak desa, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya masih belum memadai. Kondisi jalan yang rusak atau sulit dilalui, terutama saat musim hujan, membuat akses ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan menjadi sulit. Keterbatasan ini menghambat mobilitas penduduk, distribusi produk pertanian, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

2. Akses Terbatas terhadap Pendidikan

Pendidikan di perdesaan sering kali terbatas, baik dari segi fasilitas, kualitas pengajaran, maupun akses ke pendidikan lanjutan. Sekolah-sekolah di desa sering kekurangan tenaga pengajar, fasilitas pembelajaran yang tidak memadai, dan bahan ajar yang kurang lengkap. Kondisi ini menyebabkan anak-anak di desa memiliki akses yang lebih terbatas terhadap pendidikan berkualitas, sehingga peluang mereka untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan juga lebih kecil.

3. Kualitas Layanan Kesehatan yang Rendah

Banyak desa yang tidak memiliki fasilitas kesehatan yang memadai. Puskesmas yang ada di desa-desa sering kali kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan medis yang penting. Masyarakat desa sering kali harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan

perawatan medis, yang menyebabkan penanganan kesehatan menjadi tidak optimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas kesehatan masyarakat desa dan rentan terhadap penyakit.

4. Ketergantungan pada Pertanian Tradisional

Mayoritas penduduk desa masih menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian tradisional. Meskipun pertanian menjadi tulang punggung ekonomi perdesaan, penggunaan teknologi yang masih minim dan keterbatasan akses terhadap sarana produksi modern membuat produktivitas pertanian rendah. Selain itu, ketergantungan pada musim dan harga komoditas yang fluktuatif menjadikan pendapatan petani tidak stabil, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan mereka.

5. Keterbatasan Akses Modal dan Pasar

Akses terhadap permodalan dan pasar adalah tantangan besar bagi masyarakat desa yang ingin mengembangkan usaha, baik di bidang pertanian, kerajinan, atau usaha mikro lainnya. Banyak pelaku usaha di desa yang kesulitan mendapatkan pinjaman atau investasi untuk mengembangkan usaha mereka. Di sisi lain, akses pasar yang terbatas menyebabkan produk desa sulit bersaing di pasar yang lebih luas, baik karena jarak yang jauh dari pusat perdagangan maupun karena kurangnya pengetahuan tentang jaringan pemasaran modern. Hal ini membuat usaha-usaha lokal sulit berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi desa.

Di Jawa barat, pembangunan dari arah desa menyumbang 75% kontribusi dalam pembangunan daerah, dan pemerintah daerah wajib untuk ikut hadir dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat desa, pemerintah Provinsi Jawa Barat turut turun kerja bagi warganya, salah satunya dengan program insentif untuk desa mandiri dan berprestasi yaitu Mobil Maskara (Youtube). Pembangunan desa di Jawa Barat di masa kepemimpinan Ridwan Kamil ditandai dengan adanya indeks desa membangun dengan indikator tuntasnya desa tertinggal dan lahirnya desa mandiri di Jawa Barat. Program Mobil Maskara pertama kali diusulkan Gubernur Ridwan Kamil pada tahun 2019, dengan implementasinya yang kemudian

dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat. (Indra, 2023).

Mobil Aspirasi Kampung Juara menjadi salah satu inovasi dari pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan di daerah perdesaan. Program ini merupakan inovatif yang diusung oleh Ridwan Kamil pada saat menjabat menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Dan diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa (Berita Derah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 8) Pasal 6 yang berisikan tentang prioritas kegiatan untuk sasaran terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 huruf a, yaitu Mobil Aspirasi Kampung Juara (MASKARA). Dalam peraturan ini, MASKARA disebutkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Mobil Aspirasi Kampung Juara merupakan mobil serbaguna yang diberikan oleh Ridwan Kamil melalui DPMP Provinsi Jawa Barat kepada desa-desa yang sudah berstatus mandiri dan berprestasi.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil, yang akrab disapa Emil, merupakan pencetus mobil aspirasi kampung juara atau biasa disebut Maskara. Proses awal lahirnya Maskara dimotivasi oleh curhan warga desa di media sosial, yang antara lain mengutarakan kesulitan angkutan orang sakit dan barang serta kekurangan fasilitas hiburan di daerah pedesaan

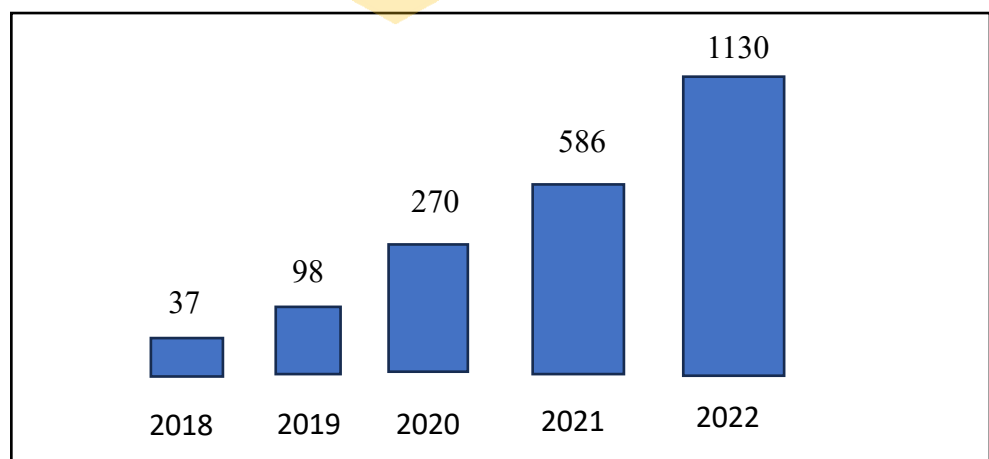
Desa berstatus mandiri dan berprestasi mengacu pada desa yang telah mencapai tingkat kemandirian yang tinggi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan pemerintahan, serta mampu menjalankan fungsinya dengan baik secara berkelanjutan. Desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari luar. Sedangkan desa berprestasi adalah desa yang menunjukkan capaian luar biasa dalam berbagai bidang, seperti pengelolaan keuangan desa, inovasi program pembangunan, partisipasi masyarakat, serta menjaga lingkungan.

Mobil dengan konsep multifungsi tersebut difasilitasi untuk memenuhi kebutuhan primer warga desa terutama untuk keperluan publik. Program Mobil Aspirasi Kampung Juara ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan publik di desa. Mobil Aspirasi Kampung Juara sendiri merupakan sebuah mobil yang dirancang untuk meningkatkan strata desa di Jawa Barat dengan memberikan fasilitas yang dapat menggerakkan kehidupan di desa.

Mobil Aspirasi Kampung Juara dirancang sebagai kendaraan multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti angkutan warga desa, penyuluhan untuk warga desa, ambulan, sarana hiburan, angkutan pertanian, perpustakaan berjalan untuk meningkatkan literasi, serta panggung untuk hajatan. Mobil Aspirasi Kampung Juara ini juga dilengkapi dengan alat-alat seperti sound system, layar proyektor, 2 buah kursi dan genset.

Mobil Aspirasi Kampung Juara memang bukan untuk setiap desa, karena hanya desa terpilih yang bisa jadi penerima Mobil Maskara. Hal tersebut yang menyebabkan pertumbuhan desa mandiri meningkat. Jumlah kenaikan desa predikat mandiri berprestasi meningkat. Pada tahun 2018 hanya ada 37 desa berpredikat mandiri berprestasi, pada tahun 2019 menjadi 98 desa berpredikat mandiri berprestasi, pada tahun 2020 menjadi 270 desa berpredikat mandiri berprestasi, pada tahun 2021 menjadi 586 desa berpredikat mandiri berprestasi, tahun 2022 menjadi 1130 desa berpredikat mandiri berprestasi.

Gambar 1. 1
Jumlah Kenaikan Desa Predikat Mandiri Berprestasi



Sumber: Youtube (DPM DESA JABAR)

Mobil Maskara mulai diberikan kepada desa-desa mulai dari tahun 2019 sebanyak 126 unit mobil, tahun 2020 sebanyak 102 unit mobil, tahun 2021 sebanyak 86 unit mobil, dan tahun 2022 sebanyak 80 unit. (DPM DESA JABAR, 2024)¹ Capaian prestasi signifikan dicatat dengan naiknya jumlah desa mandiri dari 500 menjadi 1130 desa, yang berkontribusi sebanyak 75% secara keseluruhan pembangunan di Jawa Barat. Pemberian Mobil Maskara tidak diberikan kepada seluruh desa yang ada di Jawa Barat, melainkan diberikan kepada desa yang bestatus mandiri berprestasi. Desa berstatus mandiri berprestasi adalah desa yang sudah mencapai tingkat kemandirian yang tinggi dalam berbagai aspek pembangunan, sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Desa ini mampu mengelola sumber daya dengan baik, memberdayakan masyarakatnya, dan mencapai indikator-indikator keberhasilan pembangunan desa yang telah ditetapkan pemerintah. Desa berstatus mandiri biasanya memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.

Kriteria desa yang akan mendapatkan Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) didasarkan pada beberapa indikator utama yang mencerminkan kemandirian dan prestasi desa tersebut. Beberapa kriteria umum yang dijadikan acuan untuk penentuan desa penerima Maskara antara lain:

1. Status Desa Mandiri

Desa harus memiliki status desa mandiri menurut Indeks Desa Membangun (IDM), yang diukur berdasarkan tiga aspek utama yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Desa mandiri dianggap mampu menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

2. Prestasi Desa

¹ Anonymous. 2024. *Mobil Aspirasi Kampung Juara (MASKARA) Provinsi Jawa Barat*. [online] Dpm Desa Jabar. Available at: https://youtu.be/l1HE0vuXNsA?si=Pb-3rIZVO_v8dTjp

Desa yang dinilai memiliki prestasi tertentu, baik dalam pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kesejahteraan masyarakat, inovasi dalam pembangunan, atau keberhasilan dalam pelaksanaan program-program desa, sering diprioritaskan.

3. Partisipasi dan Inovasi

Desa yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memiliki inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan ekonomi lokal, menjadi salah satu kriteria penting.

4. Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas

Desa yang mampu mengelola keuangannya dengan baik, transparan, dan akuntabel, serta memiliki laporan yang baik terkait penggunaan Dana Desa atau program-program pembangunan desa, berpotensi mendapatkan Maskara.

5. Potensi Perekonomian Desa

Desa yang menunjukkan potensi pengembangan ekonomi lokal yang baik, seperti pertanian, UMKM, pariwisata, atau kegiatan produktif lainnya, menjadi prioritas untuk mendapatkan Maskara sebagai sarana peningkatan aktivitas ekonomi.

6. Keberhasilan Program Pembangunan

Desa yang berhasil dalam mengimplementasikan program-program pembangunan desa, seperti program infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan, juga menjadi pertimbangan.

Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) ini disediakan untuk mendukung desa dalam berbagai aspek, mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, hingga pemerintahan, sehingga kriteria desa penerima biasanya menekankan pada kemampuan desa untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan kendaraan ini untuk kemajuan dan kemandirian desa.

Desa Klapanunggal merupakan salah satu desa di Kecamatan Klapanunggal yang mendapatkan penghargaan berupa Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) pada tanggal 5 Januari 2020. Penghargaan ini merupakan bentuk

apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada desa-desa yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam peningkatan strata desa. Desa Klapanunggal berhasil bertransformasi dari desa berkembang menjadi desa mandiri berprestasi, yang merupakan salah satu syarat utama bagi desa yang ingin memperoleh Mobil Maskara. Program ini sendiri bertujuan untuk mendorong desa-desa di Jawa Barat agar dapat bertransformasi menjadi lebih mandiri, maju, dan sejahtera sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Mobil Maskara bukanlah program yang diberikan secara merata kepada seluruh desa, melainkan hanya diberikan kepada satu desa di setiap kecamatan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Desa Klapanunggal menjadi satu-satunya desa di Kecamatan Klapanunggal yang menerima kendaraan multifungsi tersebut. Keputusan ini didasarkan pada berbagai faktor yang menunjukkan keunggulan Desa Klapanunggal dibandingkan desa-desa lainnya di kecamatan tersebut.

Salah satu alasan utama yang membuat Desa Klapanunggal layak menerima Mobil Maskara adalah tingginya tingkat Keamanan dan Ketertiban Nasional (Kamtibnas) di desa ini. Desa Klapanunggal dinilai sebagai desa dengan Kamtibmas terbaik di Kecamatan Klapanunggal, yang menunjukkan bahwa lingkungan di desa ini relatif aman, kondusif, dan memiliki tingkat kriminalitas yang rendah. Keamanan dan ketertiban merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan desa, karena tanpa stabilitas keamanan, sulit bagi desa untuk berkembang dan mencapai kesejahteraan. Dengan situasi yang aman dan tertib, berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan lancar, termasuk pengembangan sektor ekonomi dan wisata.

Selain faktor Kamtibmas yang baik, Desa Klapanunggal juga memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Klapanunggal. Populasi yang besar menjadi salah satu indikator penting dalam pemilihan penerima Mobil Maskara, karena semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar pula dampak positif yang dapat diberikan oleh kendaraan ini kepada masyarakat. Mobil Maskara dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan

desa, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang banyak, keberadaan mobil ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Klapanunggal.

Selain kedua faktor utama tersebut, Desa Klapanunggal juga memiliki keunggulan dalam bidang pariwisata. Keberadaan tempat wisata di desa ini menjadi salah satu daya tarik yang berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pariwisata merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, karena dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan desa. Dengan adanya tempat wisata yang berkembang, Desa Klapanunggal mampu menunjukkan prestasi dalam pengelolaan dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, yang menjadi salah satu kriteria dalam pemberian Mobil Maskara.

Mobil Maskara sendiri merupakan kendaraan multifungsi yang dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas di desa. Kendaraan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial, edukasi, dan ekonomi. Dengan adanya Mobil Maskara, Desa Klapanunggal dapat lebih mudah dalam mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti sosialisasi program pemerintah, penyuluhan kesehatan, serta promosi produk unggulan desa. Selain itu, mobil ini juga dapat digunakan sebagai sarana hiburan dan edukasi bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup warga desa secara keseluruhan.

Pada tanggal 5 Januari 2020, Mobil Maskara secara resmi diterima oleh Kepala Desa Klapanunggal, Ibu Tini Prihartini. Serah terima kendaraan ini menjadi momen bersejarah bagi desa, karena menandakan pengakuan atas prestasi dan kemajuan yang telah dicapai oleh Desa Klapanunggal. Dengan adanya Mobil Maskara, diharapkan Desa Klapanunggal semakin maju dan mandiri, serta mampu menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa dengan

kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, sebuah desa dapat berkembang pesat dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kemajuan desa, Mobil Maskara tidak hanya sekadar simbol prestasi, tetapi juga hadir dengan berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor penting, seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan hiburan, sehingga keberadaannya diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas bagi warga Desa Klapanunggal.

Salah satu program utama dari Mobil Maskara adalah layanan mobil angkut pertanian, yang bertujuan untuk membantu para petani dalam mendistribusikan hasil panen mereka dengan lebih efisien. Selain itu, Mobil Maskara juga difungsikan sebagai ambulans darurat yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan akses cepat ke fasilitas kesehatan. Di bidang pendidikan, Mobil Maskara berperan sebagai perpustakaan berjalan yang menyediakan berbagai buku bacaan guna meningkatkan minat baca dan wawasan masyarakat. Tidak hanya itu, mobil ini juga memiliki fungsi sebagai sarana hiburan, di mana bagian belakangnya dapat dijadikan panggung untuk berbagai pertunjukan seni dan acara sosial, sehingga mampu mempererat hubungan antarwarga.

Meskipun program-program yang tersedia sangat beragam dan memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan desa, sayangnya, tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana awal. Beberapa kendala di lapangan menyebabkan pemanfaatan Mobil Maskara belum optimal. Misalnya, layanan mobil angkut pertanian tidak banyak digunakan oleh para petani, karena kebutuhan transportasi hasil panen mereka telah dikelola secara mandiri oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kendala lainnya meliputi keterbatasan sumber daya dan koordinasi dalam pengoperasian mobil ini, sehingga beberapa program belum dapat berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Meskipun demikian, keberadaan Mobil Maskara tetap menjadi aset berharga bagi Desa Klapanunggal. Dengan pengelolaan yang lebih baik serta kerja sama yang solid antara pemerintah desa dan masyarakat, berbagai kendala yang ada

dapat diatasi sehingga manfaat dari program ini dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas:

1. Bagaimana efektivitas Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) di Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis efektivitas Mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) di Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini memberikan manfaat serta memiliki makna secara signifikan bagi dunia pendidikan (akademisi). Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai efektivitas Mobil Aspirasi Kampung Juara (MASKARA) di Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor serta sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan wawasan yang lebih dalam pengelolaan Mobil Aspirasi Kampung Juara (MASKARA) yang efektif dan strategis, agar dapat memaksimalkan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas masyarakat desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara berurutan yang terdiri dari beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian yang telah diuraikan. Hal ini bertujuan agar setiap permasalahan yang akan dibahas dapat diketahui secara mudah. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu, kerangka konsep, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini diuraikan mengenai pendekatan penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian.

